

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Insiden keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar dalam Program Makan Bergizi gratis (MBG) menjadi titik balik krusial dalam pelaksanaan kebijakan strategis nasional. Laporan resmi menunjukkan angka korban mencapai 11.640 jiwa di berbagai wilayah, dengan temuan media yang mengindikasikan adanya kontaminasi bakteri patogen serta pelanggaran standar operasional prosedur pada dapur penyedia (Setuningsih & Dirgantara, 2025). Tingginya angka korban mencerminkan kerentanan tata kelola distribusi pangan dalam skala besar, sehingga insiden ini bukan lagi sekadar masalah teknis dapur melainkan ancaman nyata bagi keberhasilan agenda pemenuhan nutrisi nasional.

Salah satu wilayah yang terdampak oleh insiden keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah Bandung Barat, di mana sebanyak 1.315 siswa mengalami gangguan kesehatan. Tim penyelidikan independen dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa senyawa nitrit kemungkinan besar menjadi faktor utama dibalik kejadian ini, didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium terhadap beberapa bahan makanan yang ternyata melampaui batas keamanan yang diperbolehkan (Shabrina, 2025). Dominasi cemaran zat kimia berbahaya pada paket konsumsi pelajar di tingkat lokal ini menjadi alarm bagi

pemerintah, bahwa pengawasan rantai pasok di daerah masih memiliki celah fatal yang berpotensi menurunkan kepercayaan standar kesehatan publik secara meluas.

Keprihatinan terhadap standar keamanan pangan ini senada dengan dorongan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi prosedur di lapangan secara total. Hal ini berkaitan dengan pendapat Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Kesehatan, Okky Asokawati mengemukakan urgensi agar pemerintah segera memberlakukan moratorium program Makan bergizi Gratis (MBG) pada sekolah-sekolah yang terdampak kasus keracunan siswa. Langkah tegas ini diperlukan agar proses investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan kesehatan tersebut dapat berjalan maksimal tanpa risiko tambahan. Okky menekankan pentingnya keterlibatan aktif Dinas Kesehatan sebagai pengawas guna menjamin standar nutrisi serta keamanan pangan bagi seluruh peserta didik. Selain itu, pemerintah diharapkan menunjuk petugas khusus untuk memverifikasi kelayakan tekstur dan aroma makanan sebelum disajikan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali (Metrotvnews.com, 2025).

Gagasan tersebut muncul sebagai respons atas serangkaian insiden medis yang menimpa pelajar di berbagai daerah setelah mengonsumsi paket makanan dari program pemerintah tersebut. Penekanan pada aspek regulasi dan pengawasan ketat menjadi poin krusial agar inisiatif pemenuhan gizi nasional tidak justru membahayakan keselamatan anak-anak. Melalui mekanisme penyaringan makanan yang lebih disiplin, beban tanggung jawab keamanan pangan tidak akan lagi melimpah kepada tenaga pendidik yang sudah memiliki tugas pokok mengajar. Implementasi pengawasan profesional diharapkan mampu menciptakan sistem

distribusi konsumsi yang jauh lebih aman, higienis, dan terukur bagi keberlangsungan program jangka panjang.

Gambar 1. 1
Komnas HAM ungkap kesaksian guru dan siswa SD di Jember melalui cnnindonesia.com



Sumber: Tangkapan layar portal berita *online* cnnindonesia.com
(diakses pada 29 Desember 2025)

Sebanyak 58 murid Sekolah Dasar Negeri 05 Sidomekar di Kabupaten Jember mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurut laporan dari para guru dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dikatakan bahwa siswa - siswa melaporkan adanya larva atau belatung dalam hidangan tersebut, serta menunjukkan gejala seperti mual, muntah, pusing, dan sakit perut muncul sekitar 10 hingga 15 menit setelah makan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sangat mencurigai bahwa selada dan

timun merupakan sumber utama dari keracunan. Kemungkinan akibat kontaminasi bahan kimia seperti sisa pestisida atau deterjen yang disebabkan oleh proses pembersihan yang tidak memadai (CNN Indonesia.com, 2025).

Insiden ini menggarisbawahi bahwa inisiatif pemberian Makan Bergizi Gratis tidak hanya menitikberatkan pada aspek nutrisi semata, melainkan juga harus memprioritaskan standar kebersihan dan keselamatan bahan pangan yang tinggi. Kemungkinan adanya sisa bahan kimia pada sayuran segar menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme pengendalian selama proses persiapan makanan, terutama pada langkah pembersihan bahan-bahan tersebut. Di masa mendatang, melalui pembenahan sistem kendali mutu ini sangat krusial guna menghindari ancaman kesehatan serupa sekaligus memulihkan rasa aman bagi orang tua siswa.

Menurut Arief et al, (2020) mengatakan bahwa keamanan pangan wajib diprioritaskan karena makanan yang tidak aman dapat menghilangkan manfaat gizi yang terkandung, bahkan menimbulkan risiko kesehatan serius bagi siswa. Melalui program kantin sehat, sekolah diarahkan untuk memenuhi empat pilar standar yang menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi keamanan pangan, yaitu komitmen dan manajemen sekolah, kualitas sumber daya manusia, kelayakan sarana dan prasarana, serta mutu pangan.

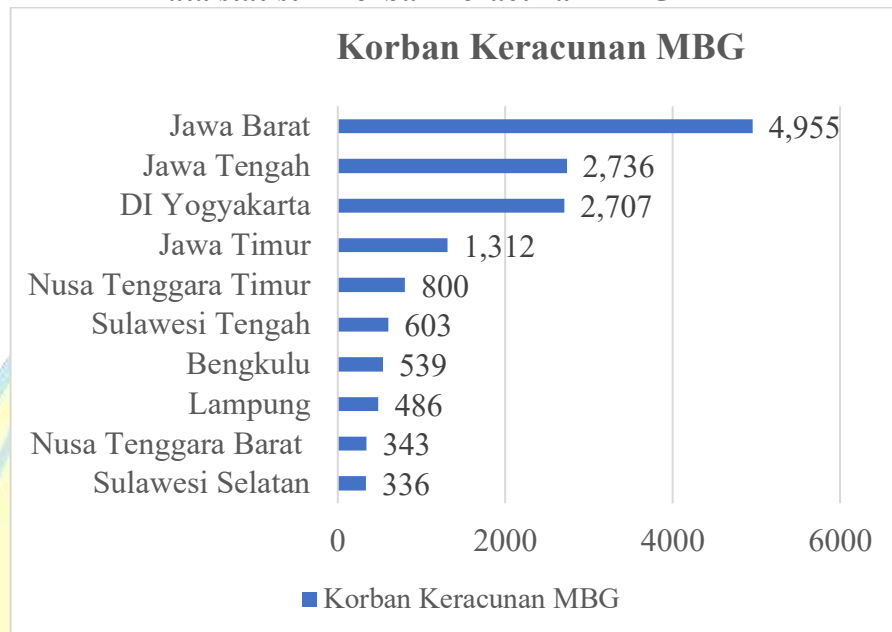
Keberhasilan pemenuhan standar tersebut membuktikan bahwa keamanan pangan bukan sekadar aspek teknis penyediaan makanan, melainkan wujud tanggung jawab institusional dalam melindungi tumbuh kembang siswa. Integrasi antara manajemen yang kuat dan ketersediaan prasarana yang memadai menciptakan sistem proteksi dini terhadap risiko kontaminasi nutrisi.

Insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyisakan kerugian pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak non-fisik yang mendalam. Dampak ini mencakup gangguan kejiwaan (psikologis) berupa trauma pada anak-anak korban, serta hilangnya rasa percaya dan munculnya ketakutan pada pihak orang tua terhadap pihak penyelenggara program. Secara lebih luas, insiden ini berpotensi mengganggu suasana dan konsentrasi belajar siswa di lingkungan sekolah. Hal ini terjadi karena rasa aman anak menjadi terancam dan timbul kecemasan berlebihan mengenai kemungkinan terulangnya kejadian serupa di masa mendatang (Riyanto & Sinaga, 2025).

Skala dampak yang meluas tersebut segera bertransformasi dari masalah kesehatan lokal menjadi krisis kepercayaan berskala nasional terhadap legitimasi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan atensi khusus dengan menegaskan bahwa insiden ini merupakan masalah besar yang harus segera diselesaikan guna melindungi martabat program unggulan negara (Illahi, 2025).

Insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa program-program sosial yang bersifat masif memerlukan persiapan teknis yang solid sebelum diluncurkan secara menyeluruh. Upaya Presiden untuk menangani masalah ini memang patut dihargai, tetapi prioritas sebaiknya ditekankan pada pembenahan mekanisme secara menyeluruh, bukan hanya sebagai tanggapan reaktif terhadap peristiwa tersebut.

Gambar 1. 2
Data statistik korban keracunan MBG



Sumber: Katadata Media Network
(diakses pada 18 Januari 2026)

Gambar 1. 2 menyajikan data yang dihimpun oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 16.109 korban di 26 provinsi hingga pada tanggal 31 Oktober 2025. Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 4.955 korban, disusul dengan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mengukuhkan dominasi kasus di Pulau Jawa. Meskipun evaluasi telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, tren kenaikan jumlah korban setiap bulannya mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan jaminan mutu pangan masih belum berjalan efektif. Dampak insiden kini semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya menyerang peserta didik, tetapi juga mulai meluas ke kelompok masyarakat rentan lainnya (Ridwan, 2025).

Gambar 1. 3
Pemerintah perkuat tata kelola MBG



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(diakses 29 Desember 2025)

Lonjakan kasus yang mencapai 16.109 korban berdasarkan data JPPI tersebut memicu respons cepat dari pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara fundamental. Menindaklanjuti instruksi Presiden, koordinasi lintas sektoral yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Kesehatan menetapkan protokol keamanan pangan yang lebih ketat, termasuk penutupan sementara fasilitas penyedia pangan yang bermasalah untuk diaudit secara menyeluruh. Salah satu perubahan kebijakan yang krusial adalah transformasi status Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari semula bersifat administratif menjadi perintah

wajib bagi seluruh unit produksi pangan. Selain penguatan standar operasional, pemerintah juga menginstruksikan pengaktifan kembali peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai instrumen pengawasan di lapangan guna memastikan akuntabilitas dan keamanan nutrisi bagi peserta didik terpenuhi secara keberlanjutan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Meskipun langkah taktis telah diambil melalui pengetatan regulasi dan audit fasilitas penyedia pangan, efektivitas kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan kredibilitas yang besar. Kontradiksi antara upaya perbaikan birokrasi dengan fakta terus meningkatnya angka insiden keracunan menciptakan ruang perdebatan publik mengenai jaminan mutu pangan nasional. Hal ini menegaskan adanya urgensi untuk membedah bagaimana diskursus mengani krisis kesehatan ini dikonstruksi oleh media massa, mengingat perbedaan pembingkai informasi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program strategis pemerintah tersebut.

Guna mencegah risiko serupa di masa depan, peristiwa ini menekankan pentingnya pengawasan ketat dan kolaborasi antara pemerintah daerah serta lembaga kesehatan untuk memastikan integritas program-program kesejahteraan anak. Sebagai respons atas krisis ini, berikut adalah *headline* berita dari media daring Tempo.co yang melaporkan adanya langkah tindak lanjut dari parlemen (DPR).

Intelligentia - Dignitas

Gambar 1. 4
Parlemen tinjau ulang dana dan kontrak MBG melalui Tempo.co



Sumber: Tangkapan layar portal berita online Tempo.co
 (diakses 18 November 2025)

Gambar 1. 4 memuat keterangan yang berasal dari pertemuan resmi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam dialog dengan parlemen tersebut, BGN mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang menjadi pusat perhatian menyusul terjadinya insiden keracunan massal. Sorotan ini mencakup pertanyaan mendalam mengenai skala anggaran yang besar serta insentif yang dialokasikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan laporan BGN, proyeksi penyerapan dana program ini diperkirakan mencapai Rp8,5 triliun hingga akhir November 2025, dan

diprediksi akan bertambah menjadi Rp10 triliun pada pertengahan Desember. Oleh karena itu, DPR menuntut adanya peninjauan ulang (evaluasi) secara menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan dapur SPPG dan standar ketahanan pangan di setiap lokasi pelaksanaan program. Permintaan ini diajukan dengan mempertimbangkan potensi dampak serius dari kasus-kasus keracunan yang telah dilaporkan (Tempo.co, 2025).

Laporan berita tersebut menekankan urgensi pertanggungjawaban dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama mengingat besarnya anggaran negara yang telah dan akan dialokasikan. Kejadian keracunan massal mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan semata-mata pada aspek ketersediaan sumber daya keuangan, melainkan pada manajemen operasional terutama dalam mengatur dapur Sekolah Penggerak Penguatan Gizi (SPPG) serta penerapan norma keselamatan bahan pangan. Dengan demikian, desakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaksanakan penilaian komprehensif merupakan tindakan yang logis dan mendesak dengan tujuan memastikan keberhasilan program, menghindari bahaya kesehatan bagi penerima bantuan, serta memastikan bahwa pemanfaatan dana negara benar-benar selaras dengan sasaran peningkatan nutrisi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Laporan media mengenai insiden keracunan dari program Makan Bergizi Gratis selama periode September hingga Oktober 2025 sesuai untuk dikaji lebih lanjut. Sebab, peristiwa ini mempunyai dampak politik yang cukup besar. Beragam media informasi menyebarkan berita tersebut, dengan mempertimbangkan fungsi

media dalam membangun realitas sosial. Adapun deskripsi singkat mengenai cakupan berita dari portal berita *online* Detik.com dan Tempo.co, yang ditetapkan sebagai objek kajian utama disajikan pada bagian berikut:

Gambar 1. 5
Pengarahan Kapolri usut keracunan MBG melalui Detik.com



Sumber: Tangkapan layar portal berita *online* Detik.com
(diakses pada 12 Oktober 2025)

Gambar 1. 5 menyajikan berita yang mengulas respons cepat dari berbagai pemangku kepentingan terkait insiden keracunan yang menimpa ribuan peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kapolri Jenderal Listyo Sigit menginstruksikan kepolisian menyelidiki serangkaian kasus secara menyeluruh. Tindakan ini mencakup pemeriksaan langsung dapur SPPG untuk menjamin keamanan pangan. Di sisi lain Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan

permohonan maaf resmi. Ia mengakui kegagalan operasional serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai faktor utama insiden. BGN berkomitmen menanggung penuh seluruh biaya perawatan korban. Legislator Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago turut menyoroti perbaikan manajemen dapur dan penyesuaian jadwal produksi. Hal ini penting agar kualitas makanan terjamin saat distribusi siang hari (Detik.com, 2025).

Gambar 1. 6
Temuan penyebab keracunan MBG melalui Detik.com



Sumber: Tangkapan layar portal berita *online* Detik.com
(diakses pada 10 Desember 2025)

Gambar 1. 6 mengulas pemberitaan yang berfokus pada hasil temuan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengenai penyebab keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian epidemiologi menunjukkan keracunan disebabkan oleh kontaminasi delapan jenis bakteri

termasuk *Salmonella*, *E. coli*, dan *Bacillus cereus*. Dua jenis virus yakni *norovirus* dan *hepatitis A* juga teridentifikasi sebagai pemicu. Faktor kimia seperti nitrit dan *scombrotxin* turut teridentifikasi. Dalam rapat Komisi IX DPR Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan total 6.517 kasus keracunan terjadi Januari hingga September 2025. Kasus ini paling banyak di Pulau Jawa dengan peningkatan signifikan pada periode Agustus - September (Detik.com, 2025).

Gambar 1. 7
Kebijakan BGN hadapi MBG melalui Tempo.co



Sumber: Tangkapan layar portal berita *online* Tempo.co
(diakses pada 10 Desember 2025)

Gambar 1. 7 berita ini mengulas respons Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menghadapi kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terdapat perbedaan angka kasus keracunan antara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat 6.452 kasus dan data gabungan BGN Kemenkes serta BPOM sekitar

5.000 kasus hingga September 2025. Meskipun banyak temuan keracunan BGN tidak menghentikan program. BGN memilih melanjutkan program sambil mengejar target penerima manfaat dan melakukan perbaikan internal. Sejumlah kebijakan baru diterapkan. Kebijakan ini meliputi pembentukan tim investigasi berisi ahli gizi dan kimia, survei menyeluruh terhadap dapur di daerah, pengetatan kinerja petugas SPPG termasuk keharusan tinggal di dapur, dan penugasan dua koki bersertifikat di setiap dapur guna menjaga mutu makanan (Tempo.co, 2025).

Gambar 1. 8
Keracunan MBG tidak mematuhi SOP melalui Tempo.co



Sumber: Tangkapan layar portal berita *online* Tempo.co
(diakses pada 10 Desember 2025)

Gambar 1. 8 menyoroti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa mayoritas kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi akibat dapur SPPG tidak mematuhi SOP, seperti pembelian bahan baku terlalu jauh dari hari penyajian hingga proses memasak dan

distribusi yang melebihi batas waktu enam jam. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR pada 1 Oktober 2025, Dadan menyebut adanya 75 kasus keracunan sejak Januari hingga Juli dan meningkat menjadi total 6.517 penerima manfaat per akhir September 2025, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat lebih dari 8.000 korban. BGN menegaskan akan menindak dan menutup sementara SPPG yang tidak memenuhi standar hingga perbaikan dilakukan (Tempo.co, 2025).

Kajian-kajian sebelumnya umumnya menganalisis pemberitaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada masa awal implementasi, misalnya sekitar bulan Januari. Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada rentang waktu lebih mutakhir yaitu September hingga Oktober. Pemilihan periode ini krusial karena bertepatan dengan peningkatan tajam kasus keracunan MBG. Perubahan situasi yang dinamis ini sangat memengaruhi bingkai (*framing*) yang digunakan media dalam meliput isu. *Gap* penelitian dalam literatur ini mengisi dengan mengkaji *framing* pemberitaan keracunan MBG pada periode terkini.

Beragamnya sudut pandang dalam pemberitaan insiden keracunan ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima publik bukan sekadar laporan teknis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang sengaja dibangun oleh media. Menurut Susilowati (2020) mengemukakan pendapat bahwa realitas sosial merujuk pada kenyataan masyarakat yang tersembunyi dalam pergaulan antar manusia yang diungkapkan secara bersama melalui tindakan bersama, seperti berbicara menggunakan bahasa dan bekerja sama melalui kelompok-kelompok masyarakat. Namun, media komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan fakta lapangan secara netral, melainkan melalui mekanisme pemilihan, penekanan, dan interpretasi

yang mereka bangun sebagai kerangka acuan publik untuk memahami kondisi yang terjadi.

Media memberikan informasi kepada khalayak sangat cepat, pada era globalisasi ini. Untuk merespons hal tersebut, menimbulkan tekanan sebagaimana memaksa media massa menyajikan suatu peristiwa dalam jangka waktu yang terbatas. Perkembangan teknologi komunikasi terkini serta jaringan internet memberikan kemudahan akses informasi secara cepat dan tanpa adanya hambatan. Sebagian besar individu mengandalkan platform digital, khususnya pada situs berita daring sebagai referensi utama untuk memperoleh kabar terkini (Pratama et al., 2025).

Menurut Anggareswari & Isnaeni (2020), mengatakan bahwa komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan dalam waktu dan informasi yang dapat diterima secara bersamaan dengan tidak diketahui identitasnya, serta menjangkau audiens luas dari berbagai kelompok sosial menggunakan saluran cetak atau elektronik. Media massa memegang peranan sentral dalam menelaah suatu peristiwa serta membentuk kenyataan sosial di tengah pandangan masyarakat.

Agar publik mengambil keputusan dengan bijak, media mempunyai tanggung jawab dalam menghadirkan data yang tepat dan seimbang. Sebaliknya, dengan praktik liputan yang memihak dapat berisiko menimbulkan miskomunikasi dan perpecahan di tengah masyarakat (Wardanu et al., 2024). Oleh karena itu, untuk mengatasi kekhawatiran tersebut penelitian pada pemberitaan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis sangat relevan dikaji dengan menggunakan analisis *framing*. Kemudian, media dapat membingkai kasus tersebut dengan

memilih sudut pandang dan menekankan data tertentu. Sehingga masyarakat terpengaruh dalam pemberitaan tersebut.

Pemilihan model analisis *framing* Robert N. Entman dalam penelitian ini didasari oleh ketajaman instrumen tersebut dalam membedah cara media *online* mengonstruksi realitas. Entman (2004, p. 5) menegaskan bahwa *framing* bekerja melalui mekanisme seleksi dan penojolan aspek-aspek tertentu dari sebuah peristiwa guna mempromosikan interpretasi, evaluasi, hingga solusi yang spesifik. Penerapan elemen- elemen ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana kedua media tersebut menghubungkan berbagai fakta guna menggiring pemahaman publik mengenai insiden keracunan tersebut.

Spirit utama yang diangkat dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Entman mengenai fungsi strategis dari sebuah bingkai berita. Tujuan akhir dari proses *framing* adalah untuk memobilisasi dukungan atau justru menciptakan perlawanan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontroversi politik (Entman, 2004, p. 5). Kasus keracunan makanan dalam program nasional ini secara otomatis menempatkan kredibilitas pemerintah serta penyedia layanan dalam pengawasan ketat masyarakat. Analisis *framing* membantu mengungkap narasi yang dibangun oleh Detik.com dan Tempo.co cenderung memberikan dukungan moral terhadap keberlanjutan program atau justru mendorong dukungan moral atau justru mendorong resistensi publik melalui kritik tajam atas kegagalan sistem keamanan pangan.

Kekuatan *framing* dalam memengaruhi dukungan publik inilah yang menjadi alasan utama peneliti menggunakan perspektif Robert N. Entman. Penjelasan lebih mendalam mengenai struktur teori dan elemen-elemen *framing* tersebut akan dipaparkan secara komprehensif pada bagian strategi penelitian.

Penetapan batas waktu penelitian pada bulan September hingga Oktober 2025 merupakan langkah strategis untuk menjaga fokus analisis pada puncak kontroversi. Rentang waktu tersebut dipilih karena mempresentasikan fase paling dinamis dalam pemberitaan program Makan Bergizi Gratis. Peneliti memandang bahwa intervensi kebijakan dari otoritas tertinggi yang terjadi pada periode ini memberikan data yang paling kaya untuk dibedah menggunakan instrumen *framing*. Pembatasan ini dilakukan agar hasil penelitian tetap objektif dan tidak terdistraksi oleh isu-isu sekunder yang muncul di luar periode krisis tersebut.

Media memiliki peran krusial dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu fenomena melalui informasi yang disajikannya. Merujuk pada analisis Putri et al. (2024), tim kreatif media memiliki otoritas dalam mengolah dan menyajikan konten yang mampu memengaruhi bagaimana publik memaknai suatu peristiwa di lapangan. Informasi yang telah dikemas melalui sudut pandang tertentu tersebut pada akhirnya akan menjadi acuan utama bagi masyarakat dalam menilai suatu fenomena sosial. Dengan demikian, media berfungsi sebagai instrumen yang menentukan arah penilaian moral serta sikap nyata khalayak dalam merespons realitas yang terjadi di sekitarnya. Hal ini tercermin secara nyata ketika media melakukan pembingkaihan terhadap peristiwa-peristiwa sensitif di masyarakat. Dalam konteks pemberitaan kasus keracunan 'Makan Bergizi Gratis' di portal

Detik.com dan Tempo.co, realitas yang diterima oleh publik bukan sekadar fakta objektif di lapangan, melainkan hasil konstruksi media yang dipengaruhi oleh pembingkaihan tertentu. Kesan yang dibentuk melalui *framing* ini pada akhirnya akan menentukan bagaimana masyarakat memberikan penilaian moral maupun tindakan nyata dalam menyikapi keberlangsungan program pemerintah tersebut.

Detik.com dan Tempo.co dipilih sebagai bahan kajian karena keduanya adalah situs berita *online* utama di tingkat nasional yang menunjukkan ciri penyuntingan dan arah liputan yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan cara penyusunan berita tentang masalah yang sama. Di luar alasan metode ini, pilihan terhadap kedua situs tersebut juga didukung oleh besarnya jangkauan pembaca yang cukup tinggi.

Menurut laporan *Digital News Report 2025* yang dikeluarkan oleh *Reuters Institute* dan diringkas oleh Databoks Katadata, Detik.com dan Tempo.co masuk dalam sepuluh situs berita *online* yang paling banyak dibuka oleh orang Indonesia pada awal tahun 2025. Detik.com memiliki tingkat kunjungan sebesar 46 persen dalam satu minggu dan 28 persen dalam tiga hari terakhir, sedangkan Tempo.co mencapai 16 persen dalam satu minggu serta 7 persen dalam tiga hari terakhir (Santika, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa kedua situs memiliki pembaca yang banyak dan cocok dijadikan bahan kajian dalam penelitian liputan berita *online*.

1.2 Identifikasi Masalah

Insiden keracunan massal yang menimpa ribuan peserta didik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang September sampai Oktober 2025 secara

mendasar mengungkapkan jurang pemisah lebar antara maksud program dengan pelaksanaannya di lapangan. Program yang semula bertujuan meningkatkan taraf gizi dan kesejahteraan peserta didik justru menimbulkan dampak serius berupa gangguan kesehatan. Hal ini terbukti dari laporan korban mencapai lebih dari sebelas ribu jiwa. Akar masalah utama terletak pada kelalaian mematuhi standar keamanan pangan selama proses operasional. Berbagai indikasi seperti dugaan waktu pengolahan yang terlalu singkat penemuan delapan jenis bakteri dan dua virus hingga tindakan penghentian program sementara oleh pemerintah daerah semuanya menunjukkan kelemahan pengawasan mutu kebersihan di dapur penyedia layanan (SPPG). Kondisi ini menggoyahkan kepercayaan masyarakat dan menuntut penilaian ulang menyeluruh terhadap sistem pengadaan serta penyaluran makanan di lembaga pendidikan.

Melihat besarnya perhatian publik terhadap krisis keracunan MBG ini timbul kebutuhan mendesak menganalisis bagaimana fakta kejadian tersebut diolah dan dibentuk menjadi sebuah kenyataan sosial oleh media massa. Karena Detik.com dan Tempo.co merupakan dua portal berita daring terkemuka rujukan utama masyarakat menjadi hal penting mengetahui perbedaan cara pandang atau pembedaan (*framing*) yang mereka gunakan dalam memberitakan isu sensitif ini. Dengan menggunakan model analisis *Framing* Entman, kajian ini akan berfokus pada cara kedua media tersebut dengan memilih fakta yang menonjol menafsirkan sumber masalah memberikan penilaian etis dan menyajikan usulan perbaikan. Analisis mendalam ini diperlukan untuk menyingkap sudut pandang utama yang disajikan kepada khalayak sekaligus mengidentifikasi potensi kecenderungan

liputan yang dapat mempengaruhi pandangan umum serta proses evaluasi kebijakan MBG yang sedang berlangsung.

1.3 Keunikan Penelitian

Kajian ini memiliki kekhususan yang membedakannya dari penelitian sebelumnya mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian terdahulu berupa jurnal nasional terakreditasi *A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program* yang berfokus pada peninjauan pelaksanaan kebijakan berbagai aspek Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Suprpto et al., 2025). Berbeda dengan jurnal internasional bereputasi *News media framing of food poverty and insecurity in high-income countries: a rapid review* yang meninjau bagaimana media global merepresentasikan kemiskinan dan kerawanan pangan di negara-negara maju (Kerins et al., 2023). Studi ini menyajikan keunikan melalui analisis spesifik terhadap *framing* pemberitaan kasus keracunan MBG di Indonesia. Kekhasan penelitian ini terletak pada penggunaan model Entman untuk mengkaji secara aktual liputan krisis MBG oleh portal Detik.com dan Tempo.co pada periode September hingga Oktober 2025, menghasilkan perspektif baru mengenai bagaimana media daring membingkai isu program pemerintah saat terjadi krisis.

1.4 Pembatasan Masalah

Guna menjaga fokus penelitian agar tetap terarah dan mendalam, kajian ini memiliki batasan yang ketat. Pembatasan pertama terletak pada sumber data. Penelitian ini hanya menganalisis pemberitaan yang diterbitkan oleh dua portal berita daring utama yaitu Detik.com dan Tempo.co. Kedua, penelitian dibatasi pada lingkup waktu tertentu. Analisis hanya mencakup artikel yang dipublikasikan

selama periode terjadinya lonjakan kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis yakni antara September hingga Oktober 2025. Artikel yang terbit di luar periode waktu atau di luar kedua media tersebut tidak akan menjadi bahan kajian utama dalam penelitian ini.

1.5 Fokus Penelitian

Kasus keracunan makanan yang terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai sekolah dasar dan menengah telah menimbulkan kekhawatiran serius di masyarakat dan menjadi perhatian nasional. Gelombang keracunan massal dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung Barat, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya. Dimana ratusan hingga ribuan siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Misalnya, dalam dua pekan saja tercatat setidaknya 1.775 pelajar di Jawa Barat dilaporkan keracunan setelah menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah-sekolah (Bagaskara, 2025).

Setelah meninjau latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, serta batasan masalah dalam penelitian ini terkait kasus keracunan Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara kedua media daring membingkai peristiwa tersebut penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *framing* pemberitaan Detik.com berjudul “Arahan Kapolri Usut Rentetan Kasus Keracunan MBG” berdasarkan empat elemen analisis *framing* Robert Entman?

2. Bagaimana *framing* pemberitaan Detik.com berjudul “Menkes Ungkap Temuan Penyebab Keracunan MBG, Ada 8 Bakteri hingga 2 Virus” berdasarkan empat elemen analisis *framing* Robert Entman?
3. Bagaimana *framing* pemberitaan Tempo.co berjudul “Yang Dilakukan BGN Hadapi Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis” berdasarkan empat elemen analisis *framing* Robert Entman?
4. Bagaimana *framing* pemberitaan Tempo.co berjudul “Dadan Hindayana Bilang Keracunan MBG Disebabkan Dapur Tak Patuhi SOP” berdasarkan empat elemen analisis *framing* Robert Entman?

1.6 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan utama menjelaskan secara rinci bagaimana *framing* media dalam meliput kasus keracunan Makan Bergizi Gratis yang kian meningkat di beberapa daerah. Detik.com dan Tempo.co termasuk media yang aktif memberitakan kasus tersebut.

Salah satunya dari Detik.com berjudul "Menkes Ungkap Temuan Penyebab Keracunan MBG, Ada 8 Bakteri hingga 2 Virus" yang menekankan temuan ilmiah sebagai dasar analisis (Detik.com, 2025). Sementara dari Tempo.co artikel yang berjudul "Yang Dilakukan BGN Hadapi Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis" lebih fokus pada respons instansi terkait keracunan Makan Bergizi Gratis (Tempo.co, 2025). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *framing* pemberitaan Detik.com berjudul “Arahan Kapolri Usut Rentetan Kasus Keracunan MBG” berdasarkan empat elemen analisis *framing* Robert Entman.
2. Untuk mengetahui *framing* pemberitaan Detik.com berjudul “Menkes Ungkap Temuan Penyebab Keracunan MBG, Ada 8 Bakteri hingga 2 Virus” berdasarkan empat elemen analisis *framing* Robert Entman.
3. Untuk mengetahui *framing* pemberitaan Tempo.co berjudul “Yang Dilakukan BGN Hadapi Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis” berdasarkan empat elemen analisis *framing* Robert Entman.
4. Untuk mengetahui *framing* pemberitaan Tempo.co berjudul “Dadan Hindayana Bilang Keracunan MBG Disebabkan Dapur Tak Patuhi SOP” berdasarkan empat elemen analisis *framing* Robert Entman.

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan utama yang hendak dicapai, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kegunaan praktis bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, peneliti mengelompokkan manfaat dari pelaksanaan penelitian ini menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Kajian ini diharapkan mampu menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi, terutama pada sub-kajian media massa dan jurnanisme. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan nyata untuk memahami implementasi model analisis *framing* Entman secara lebih

mendalam. Selain itu, hasil ini juga memberikan pemahaman penting tentang bagaimana konstruksi bingkai berita dapat membentuk pandangan masyarakat atau konstruksi realitas sosial, terutama ketika media meliput masalah kebijakan pemerintah yang sensitif dan berdampak besar terhadap kesehatan umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan manfaat signifikan bagi disiplin jurnalisme dan ilmu komunikasi, terutama dalam mengkaji cara media digital menyusun kerangka pemberitaan terhadap topik sensitif yang melibatkan kebijakan publik serta aspek keamanan pangan. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan introspeksi bagi para profesional media untuk mengimplementasikan nilai-nilai keseimbangan, ketepatan informasi, dan pertanggungjawaban sosial saat melaporkan inisiatif pemerintah. Lebih lanjut, penelitian ini turut berkontribusi pada penyempurnaan pendekatan komunikasi publik, dengan mengilustrasikan potensi pengaruh kerangka pemberitaan media terhadap pandangan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebijakan program.

Intelligentia - Dignitas